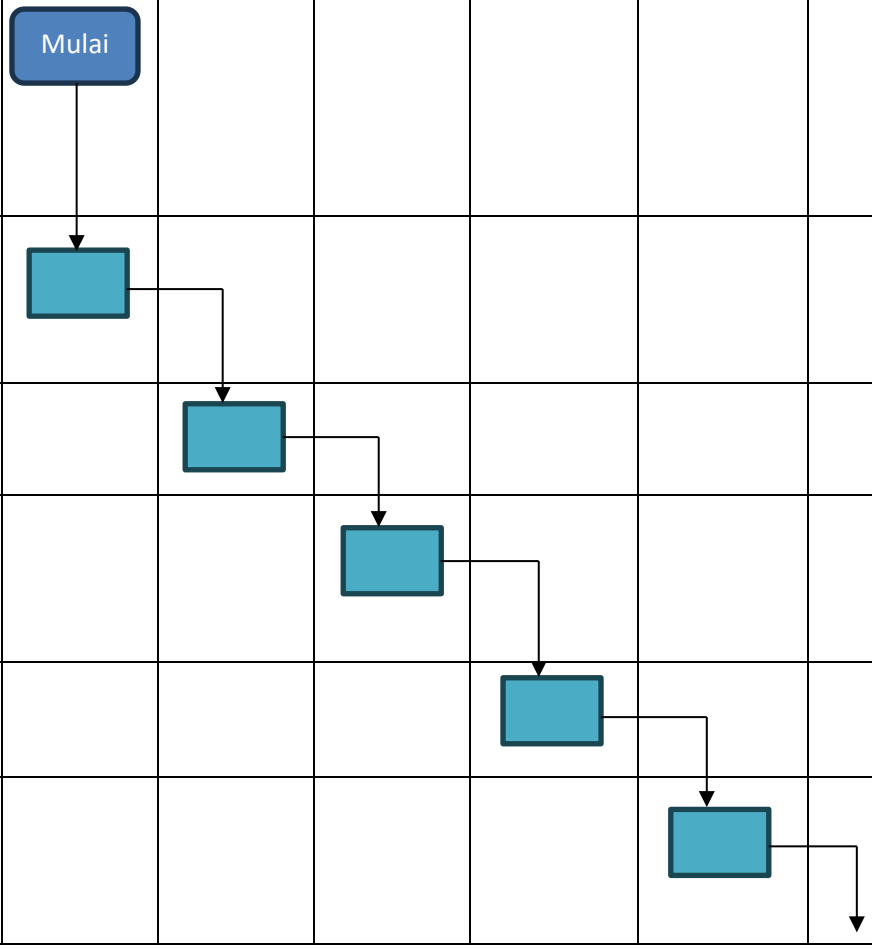
Kementerian Hukum Republik Indonesia **Kantor Wilayah Jambi** **Divisi Pelayanan Hukum**	Nomor SOP	: W.5.OT.02.02-27
	Tanggal Pembuatan	: 26 Agustus 2026
	Tanggal Revisi	:
	Tanggal Efektif	: 1 September 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Kantor Wilayah **Jonson Siagian**
	Nama SOP	: PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

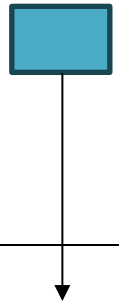
Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2026 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum; 3. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris; 4. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris; 5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Cara Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia; 6. Peraturan Menteri Hukum Nomor 22 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Pindah Wilayah, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;	1. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 2. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
SOP ini berkaitan dengan SOP Layanan Administrasi Hukum Umum lainnya	1. Komputer/Printer/Scanner 2. Jaringan internet 3. Alat Komunikasi
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendataan:**
Apabila SOP tidak dilaksanakan, maka pelaksanaan pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris yang dilaksanakan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi tidak sesuai dengan komitmen Pemerintah	Di simpan sebagai data elektronik dan manual

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP : PEMERIKSAAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS

No	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris MPD	Tim Pemeriksa MPD	Sekretaris MPW	Tim Pemeriksa MPW	Sekretaris MPP	Tim Pemeriksa MPP	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Laporan masyarakat, hasil pemeriksaan berkala, proses hukum dari Tingkat penyidikan sampai dengan Tingkat peradilan, fakta hukum lainnya	Mulai						Laporan pengaduan	14 hari	surat	
2.	Pencatatan Laporan/Registrasi Perkara dan Pembentukan Majelis Pemeriksa							Dokumen	7 hari	Surat	
3.	Melaksanakan pemanggilan, rapat, BAP dan Rekomendasi							Dokumen	10 hari	Surat, BAP dan surat rekomendasi	
4.	Pencatatan Laporan/Registrasi Perkara dan Pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah							Dokumen	1 hari	surat	
5.	Pemeriksaan, rapat, dan putusan MPW							Dokumen	10 hari	Surat, BAP dan usulan ke MPP	• PeringatanLisan • PeringatanTertulis
6.	Pencatatan Laporan/Registrasi Perkara dan Pembentukan Majelis Pemeriksa Wilayah							Dokumen	7 hari	Surat	



7.	Pemeriksaan, rapat, dan putusan MPP							Dokumen	10 hari	Surat, BAP dan putusan	• Pemberhentian Sementara • Pemberhentian Dengan Hormat • Pemberhentian Dengan Tidak Horamat
8.	Menteri Hukum menerbitkan SK Pemberhentian Sementara/ Pemberhentian dengan tidak hormat dan atau memblokir akun Notaris							Dokumen	14 hari	SK Menteri Hukum	

: